

Partisipasi Pemuda dalam Program Ketenagakerjaan Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar

Jusmawandi Jusmawandi^{1*}, Safriadi Safriadi²

¹ Politeknik Negeri Fakfak, ²Universitas Hasanuddin

*Corresponding author, e-mail: joesmanwandi@gmail.com

Abstrak

Salah satu Program unggulan Bupati Takalar periode 2017-2022 yaitu penyerapan 10,000 tenaga kerja baru. Peran pemuda sangat penting dalam proses pelaksanaan program untuk menunjukkan keterlibatannya. Program ini berjalan selama tiga tahun namun belum berdampak signifikan terhadap masyarakat, bahkan Kabupaten Takalar masuk dalam daftar 10 Kabupaten dengan tingkat pengangguran tertinggi di Sulawesi Selatan pada tahun 2020. Artikel ini mendeskripsikan bentuk partisipasi pemuda dalam program Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui observasi dan wawancara mendalam (indepth interview). Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk partisipasi pemuda terbagi atas dua yaitu partisipasi fisik dan nonfisik. Partisipasi fisik meliputi kegiatan dalam bidang jasa, pendidikan, pertanian, dan lain-lain. Sedangkan partisipasi non fisik meliputi kegiatan seminar, diskusi, dan gagasan lain yang berkaitan dengan program. Berdasarkan teori Arnstein, bentuk partisipasi berada pada tingkatan Citizen Power. Pemuda memberikan kemampuan mereka dalam menentukan, melaksanakan dan melakukan evaluasi terhadap kegiatan yang mereka laksanakan. Hasil penelitian menjadi bahan evaluasi Pemerintah Kabupaten Takalar dalam menjalankan program-programnya.

Kata Kunci: Partisipasi; Pemuda; Program dan Tenaga kerja.

Abstract

One of the featured programs of the Takalar Regent, for the period of 2017-2022, is the absorption of whereabouts 10,000 new workers. The youth play an important role to show their involvement in order to observe the implementation process. This program has been running for the last three years but it has had no significant impact on the community. In contrast, the report stated that in 2020 Takalar Regency is on the list of 10 districts with the highest unemployment rate in South Sulawesi. This article describes youth participation in Takalar's government program. Given the fact that the growing number of unemployments along with population growth, Takalar Regency needs to prepare its youth to be more competitive in job markets. The study uses a qualitative approach with observation and in-depth interviews as tools. The results have shown that youth participation is consist of two, physical and non-physical participation. Physical participation includes activities in services, education, agriculture, and others. Meanwhile, non-physical participation includes seminars, discussions, and other ideas related to the program. Based on Arnstein's theory, shows that the form of participation is at the Citizen Power level. Youth provide their abilities in determining, implementing, and evaluating the activities they carry out.

Keywords: Participation; Programs; Youth and Workforce.

How to Cite: Jusmawandi, J. & Safriadi, S. (2022). Partisipasi Pemuda dalam Program Ketenagakerjaan Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar. *Jurnal Socius: Journal of Sociology Research and Education*, 9(1), 42-51.



This is an open access article distributed under the Creative Commons 4.0 Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited under the same license as the original. ©2022 by Jurnal Socius.

Pendahuluan

Keberadaan Otonomi Daerah bertujuan memberikan kemandirian bagi daerah dalam pengelolaan sumber daya. Melalui produk hukum daerah, diharapkan mampu mendatangkan kemakmuran bagi masyarakat dan kemajuan pembangunan. Pemerintah Daerah membuat perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi terhadap program sebagai upaya dalam memaksimalkan serapan anggaran dan pelaksanaannya. Dasar kegiatan yang dilaksanakan berawal dari adanya ketimpangan sosial ekonomi yang mengganggu kehidupan masyarakat. Salah satu implementasi otonomi daerah adalah untuk membangkitkan partisipasi aktif masyarakat, karena dalam pembangunan dan pengembangan daerah tidak hanya di tangan pemangku kebijakan, melainkan juga pada masyarakat yang terlibat aktif.

Undang-undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 4 menjelaskan bahwa tujuan dari peraturan ini, untuk mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah. Tenaga kerja yaitu penduduk usia angkatan kerja yang siap melakukan pekerjaan, sedang mencari kerja, bersekolah dan mengurus rumah tangga. Kondisi angkatan kerja yang seharusnya terakomodasi ke dalam perusahaan justru tidak terfasilitasi di semua daerah (Fitra & Anggraeni, 2016). Pemerintah Daerah memiliki kedudukan dalam mengeluarkan kebijakan untuk menata kehidupan masyarakat daerah otonomnya. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, ada banyak pertimbangan yang harus dijadikan pegangan pokok agar konsep pelaksanaan otonomi dapat berjalan sebagaimana mestinya di antara berbagai pertimbangan tersebut adalah penerapan tata kelola pemerintahan daerah yang baik. Hal ini termasuk dalam persoalan tenaga kerja di daerahnya (Duadji, 2013).

Peningkatan tenaga kerja tidak diikuti dengan pertumbuhan lapangan kerja, sehingga muncul pengangguran. Pengangguran akan berdampak pada masalah kemiskinan, sosial politik, kesehatan dan kriminalitas. Sebagai Negara yang memiliki jumlah penduduk 263 juta jiwa di tahun 2019, Indonesia memiliki tingkat persaingan tenaga kerja yang tinggi. Pertumbuhan penduduk diikuti ketersediaan lapangan kerja. Pada rilis data BPS 2019, jumlah pemuda usia 20-35 tahun sebesar 24% atau setara dengan 63,4 juta jiwa yang masuk dalam angka produktif sering juga disebut sebagai bonus demografi. Bonus demografi akan tantangan dan peluang jika angka produktif kerja dapat terserap ke dalam dunia kerja dan membawa kemajuan ekonomi Negara. Namun akan menjadi beban jika angka produktif tersebut tidak terserap ke dalam dunia kerja (Asjhari, 2013).

Undang-undang 1945 Pasal 28d ayat 3 menjelaskan bahwa "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja" (Wibowo, 2016). Dalam artian negara secara konstitusional berkewajiban menyediakan kesempatan kerja, produktif dan berkesinambungan. Hal ini juga didukung dalam Undang-undang No. 39 Pasal 38 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menyatakan bahwa "Setiap warga negara sesuai dengan bakat, kecakapan dan kemampuan, berhak atas pekerjaan yang layak". Artinya pemuda seharusnya mendapat kesempatan kerja sesuai dengan kapasitas yang dimiliki.

Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan (www.sulsel.bps.go.id) pada Agustus 2019 merilis data pengangguran sebanyak 318,442 orang dengan persentase 4,97% dari total penduduk. Badan Pusat Statistik Kabupaten Takalar merilis pengangguran di Takalar mencapai 5,497 orang pada tahun 2019 (www.takalarkab.bps.go.id). Data tersebut membawa Kabupaten Takalar masuk dalam daftar 10 besar tingkat pengangguran tertinggi di Sulawesi selatan (Briliani, 2019).

Kemajuan teknologi telah berdampak pada kebutuhan tenaga kerja, berbagai pekerjaan sudah mampu dikerjakan dengan robot yang memiliki tingkat efisiensi yang lebih baik. Selain itu, kriteria tenaga kerja tidak sesuai dengan kebutuhan perusahaan seperti tingkat pendidikan, dan skill yang dimiliki. Kurangnya pemerataan lowongan pekerjaan juga menjadi penyebab tingginya angka pengangguran. Daerah yang kurang berkembang dan domisili yang jauh dari lapangan pekerjaan menjadi penghambat bagi tenaga kerja mengakses lowongan pekerjaan. Padahal negara-negara global telah bersaing untuk mengisi posisi strategis dalam suatu perusahaan (Sigalingging & Warjio, 2014).

Pemerintah Kabupaten Takalar menuangkan visi misinya ke dalam program unggulan selama masa kepemimpinannya yang disebut sebagai P22. Dua puluh dua program unggulan yang ditawarkan oleh SK-HD (H. Syamsari Kitta, S.Pt, MM. - H. Achmad Se're S.Sos) yang diharapkan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat Kabupaten Takalar. Realisasi program unggulan tersebut mulai aktif tahun 2018, karena anggaran yang dialokasikan sepenuhnya direncanakan di tahun 2017.

Penelitian ini memfokuskan pada Program ke-22 yaitu penyerapan 10.000 tenaga kerja baru di Kabupaten Takalar. Yang mana Pemuda menjadi target dalam pelaksanaan program ini. Hal ini penting dalam menanggulangi pengangguran di Kabupaten Takalar. Program tersebut menarik untuk dikaji mengingat bahwa target 10.000 tenaga kerja baru menjadi suatu tugas penting bagi seluruh instansi yang terkait, seperti dinas ketenagakerjaan dan transmigrasi, dinas koperasi serta partisipasi pemuda. Wilayah Kabupaten Takalar terdiri wilayah pesisir dan daratan. Karakteristik masyarakat wilayah pesisir juga

berbeda dengan daratan. Potensi sumber daya alam dengan budaya hidup yang berbeda menjadi tantangan dalam pelaksanaan program yang sifatnya general bagi kebutuhan masyarakat. Wilayah pesisir identik dengan kehidupan perikanan dan rumput laut, sedangkan daratan identik dengan aktivitas bercocok tanam padi, jagung dan lain-lain.

Ketersediaan lahan yang tidak cukup bagi petani, atau ketergantungan nelayan terhadap hasil tangkapan serta terbatasnya peralatan yang digunakan merupakan hal yang dapat menyebabkan munculnya pengangguran dalam suatu wilayah jika tidak diselesaikan dengan baik. Program Pemerintah bertujuan menangani masalah pengangguran yang mengarah pada pembangunan manusia termasuk bidang kepemudaan (Tata, 2015).

Pembangunan bidang kepemudaan merupakan mata rantai tidak terpisahkan dari sasaran pembangunan manusia. Keberhasilan pembangunan pemuda sebagai sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki keunggulan daya saing, merupakan salah satu kunci untuk membuka peluang untuk keberhasilan di berbagai sektor pembangunan lainnya. Oleh karena itu, pembangunan kepemudaan dianggap sebagai salah satu program yang tidak dapat diabaikan dalam menyiapkan kehidupan bangsa di masa depan.

Permasalahan lainnya adalah ketahanan budaya dan kepribadian nasional di kalangan pemuda yang semakin luntur. Hal itu disebabkan oleh cepatnya perkembangan dan kemajuan teknologi komunikasi, akibat dari derasnya arus informasi global yang berdampak pada penetrasi budaya asing. Hal ini mempengaruhi pola pikir, sikap, dan perilaku pemuda Indonesia. Persoalan tersebut dapat dilihat kurang berkembangnya kemandirian, kreativitas, serta produktivitas di kalangan pemuda, sehingga pemuda kurang dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan bangsa. Upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah bisa berjalan dengan baik karena adanya komitmen serta partisipasi dari masyarakat. Pemuda sebagai bagian dari masyarakat memiliki ruang dan kesempatan dalam berpartisipasi ke dalam program Pemerintah Daerah baik itu sifatnya berbentuk tenaga, ide atau gagasan.

Berdasarkan hasil penelitian kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam program peningkatan keterampilan yang berkelanjutan masih rendah (Laily, 2015). Dalam hal meningkatkan kemampuan bidang otomotif, pemasaran, pabrikasi, dan kemampuan bahasa. Berbagai faktor lainnya yang bersumber dari pemerintah yaitu kesalahan pemerintah dalam perencanaan, kurangnya pendekatan sosialisasi, dan rendahnya kapasitas yang dimiliki pemerintah daerah dalam mengelola program-program yang berkelanjutan juga menjadi faktor penghambat dalam terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan Kabupaten Takalar.

Melihat masalah tersebut, maka hal ini menarik untuk dikaji lebih lanjut dan tentang "Partisipasi Pemuda dalam Program Ketenagakerjaan Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar". Penelitian berfokus pada aktivitas pemuda dan mengkaji secara akademis terkait partisipasi fisik dan nonfisik.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Menurut Sugiyono pendekatan kualitatif adalah penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti sebagai instrumen kunci, analisis data bersifat induktif (Melinda et al., 2021). Tipe penelitian ini adalah studi kasus. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Takalar sejak Nopember 2019 hingga Nopember 2020. Tempat penelitian meliputi Kantor Balai Latihan Kerja Kabupaten Takalar, Kantor Balai Pengembangan Wilayah Daerah Kabupaten Takalar, Kantor Dinas Transmigrasi, Permodalan dan Ketenagakerjaan Kabupaten Takalar. Selain itu, Kegiatan job fair dan pesta UMKM yang diadakan oleh Pemerintah Kabupaten Takalar di Tribun Lapangan Makkatang Dg Sibali.

Penentuan responden dilakukan secara sengaja (Purposive) dengan kriteria pemuda yang berusia 16-30 tahun dan berdomisili di Kabupaten Takalar. Jumlah keseluruhan responden dalam penelitian ini yaitu 18 orang. Dalam memperoleh data yang relevan dengan topik penelitian dilakukan dengan beberapa cara yaitu sebagai berikut; (1) Observasi dilakukan sebelum memulai wawancara, yang mana penulis melakukan pengamatan terhadap suatu fenomena berkaitan dengan topik penelitian. Observasi dilakukan untuk memperoleh informasi tentang, perkembangan program, pengangguran, lokasi tempat tinggal penduduk, waktu dan jam kerja, serta kondisi fisik lokasi penelitian. Penulis juga melakukan pengamatan pada aktivitas pemuda, pelatihan, situasi program berjalan, usaha-usaha yang digeluti dan berbagai aktivitas kepemudaan yang berkaitan dengan topik penelitian. Observasi juga dilakukan untuk mengetahui keadaan lingkungan kecamatan, desa, jarak tempuh dari kota hingga pembangunan titik usaha baru.

Analisis data dilakukan melalui tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Reduksi data adalah memilih-milih antara data yang menunjang dan tidak menunjang sesuai dengan fokus penelitian. Penyajian data diperoleh selama proses penelitian kualitatif biasanya berbentuk naratif, sehingga memerlukan penyederhanaan tanpa mengurangi isinya. Kesimpulan disajikan dan dibuat dalam pernyataan

singkat dan mudah dipahami dengan mengacu pada pokok permasalahan yang diteliti (Andayani et al., 2021).

Hasil dan Pembahasan

Pemuda merupakan agen yang dapat menjalankan proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Perannya sebagai agent of control merupakan lini terdepan dalam memperbaiki kebijakan yang salah sasaran. Tuntutan akan tanggung jawab harus dilalui demi lahirnya generasi yang siap dengan tantangan. Peran tersebut dapat melahirkan gerakan-gerakan yang dapat mendukung potensi lokal. Potensi lokal tidak hanya mengacu pada daya dukung sumber daya alam, tetapi bagaimana sumber daya manusia dapat memaksimalkan potensi yang ada.

Bentuk partisipasi di wilayah pesisir memiliki perbedaan dan kesamaan. Perbedaan tersebut terdapat pada pemanfaatan sumber daya lokal yang dimiliki seperti ikan, rumput laut, udang di pesisir serta pemanfaatan jagung di daratan. Hal yang sama ditemukan pada partisipasi nonfisik bahwa kegiatan pemuda umumnya dilakukan secara kolaboratif bersama pemuda antar wilayah di Kabupaten Takalar. Masyarakat pesisir pada umumnya telah menjadi bagian masyarakat yang pluraristik tapi masih tetap memiliki jiwa kebersamaan. Artinya bahwa struktur masyarakat pesisir rata-rata merupakan gabungan karakteristik masyarakat perkotaan dan pedesaan. Hal ini juga dikemukakan dalam penelitian bahwa struktur masyarakat pesisir sangat plural, sehingga mampu membentuk sistem dan nilai budaya yang merupakan akulturasi budaya dari masing-masing komponen yang membentuk struktur masyarakatnya (Sigalingging & Warjio, 2014). Artinya bentuk partisipasi masyarakat memungkinkan adanya kesamaan dengan wilayah lain.

Partisipasi Fisik

Partisipasi fisik secara data dari Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi meliputi partisipasi dalam bentuk Pelatihan Balai Latihan Kerja kabupaten Takalar, membuka usaha baru seperti warung kopi, wisata permandian, online shop, peternakan ayam dan sapi, bengkel, budidaya perikanan dan lain-lain. Selain itu, Ada juga yang mendapatkan modal usaha seperti bantuan mesin pompa, bibit ternak, dan beberapa program desa yang mengalokasikan sebagian dananya untuk melahirkan usaha baru (Badan usaha milik desa).

Partisipasi dalam Bidang Pendidikan

Pada dasarnya organisasi yang bergerak dalam pendidikan/pelatihan untuk melahirkan usaha baru maupun peningkatan kompetensi individu terdapat di beberapa tempat seperti pengelolaan dana desa yang dikelola Bumdes, pelatihan peningkatan pendapatan keluarga oleh TPPKK (Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga), pelatihan kerajinan tangan melalui kelompok karang taruna, maupun organisasi lain. Namun dalam penelitian ini hanya berfokus pada pendidikan di Balai Latihan Kerja. BLK menjadi pilihan bagi pemuda yang ingin mengembangkan kemampuan dalam mempersiapkan diri dalam persaingan dunia kerja.

“Ijazah SMK kak, tidak terlalu mahir. Cocok sekali melanjutkan kompetensi di sini. Banyak pelatihan dan gratis. Justru kita dikasi uang transport. Ikut pelatihan BLK dan memang kuota terbatas setiap angkatan. Saya tiga kali daftar baru lulus. Karena memang bagus pelatihannya, kita tidak bosan dan saling bantu kalau ada hal yang kita tau” (Wawancara, Januari 2020).

Beberapa pemuda memilih pelatihan di BLK karena persoalan gratis, tetapi juga ditemukan beberapa alasan seperti adanya fasilitas dari BLK untuk peserta, sertifikat kompetensi dan tidak memiliki pekerjaan sehingga mencari kesibukan (mengisi kekosongan). Untuk lolos sebagai peserta BLK juga melalui persaingan karena tingginya antusias pemuda, serta terbatasnya peserta yang akan diterima. Fungsi dari fasilitas yang disediakan adalah untuk menarik pemuda dalam mengikuti pelatihan. Menurut Maesaroh peran ini juga bertujuan untuk meningkatkan, mendukung, dan mengarahkan perhatian peserta pada materi pembelajaran yang disajikan pada Pelatihan BLK (Maesaroh, 2013).

Setiap jurusan memiliki jumlah peminat yang berbeda, seperti Pelatihan Komputer, para pemuda sangat antusias memilih jurusan ini. Karena kelebihan pendaftar terkadang peserta justru memilih kelas lain yang sebenarnya minatnya di Komputer. Beberapa peserta perempuan juga memilih kelas pelatihan seperti Kelistrikan dan Teknik Otomotif Kendaraan ringan, yang sebenarnya didominasi oleh peserta laki-laki. Kuota peserta terbatas berdasarkan anggaran yang disediakan dari Kementerian Ketenagakerjaan telah diporsir. Unit pelaksanaan teknis Bidang Pelatihan Kerja diklasifikasi dalam tiga kelas yaitu: Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja, Balai Latihan Kerja Kelas I, dan Balai Latihan Kerja Kelas II. Balai Latihan Kerja Kabupaten Takalar masuk dalam kategori Kelas II. Kuota dan jurusan setiap BLK berbeda-beda sehingga menyebabkan persaingan menjadi peserta pelatihan menjadi ketat.

Balai Latihan Kerja yang juga merupakan sinkronisasi program nasional dari Kementerian Ketenagakerjaan (Laily, 2015), telah berkontribusi 1,074 pemuda yang telah ikut dalam pelatihan

peningkatan skill. Melalui pelatihan yang disediakan, pemuda yang dilatih sesuai kompetensi peminatan. Pemuda tersebut datang dari berbagai kecamatan bahkan kabupaten sekitar seperti Jeneponto, Gowa dan Makassar. Hal ini dikarenakan BLK merupakan bagian dari Kementerian Ketenagakerjaan, sehingga status administrasi tidak menjadi halangan untuk ikut di dalamnya.

“Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar setiap tahun pasti mengupayakan penambahan kuota untuk BLK Kabupate Takalar. Di sini kita banyak menerima pendaftar dari Kabupaten Tetangga. Karena posisi daerah kita ada di tengah-tengah dan memiliki banyak pilihan kelas. Kita juga menerima dari Kabupaten Jeneponto” (Wawancara, Januari 2020).

Program ini juga berlaku bagi pemuda yang di wilayah pesisir dan daratan. Namun dalam jurusan yang disediakan, BLK tidak memfokuskan pada pengembangan potensi wilayah sehingga alumni yang dihasilkan tidak berfokus pada sumber daya alam yang ada. Kondisi ini menambah catatan pemberdayaan yang tidak pada titik yang dapat menghasilkan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) baru. Pemerintah Daerah juga mengupayakan agar kuota peserta dapat bertambah untuk mengakomodir tingginya minat peserta. Semakin banyak paket pelatihan yang tersedia maka upaya untuk mencapai target program semakin mudah. Namun Pemerintah juga harus tetap memperhatikan kualitas pelatihan agar kapasitas dan kapabilitasnya tetap terjaga.

Hanrahmawan (Andzarini & Sutarto, 2020) juga melakukan penelitian di BLK Makassar dan menemukan bahwa sangat penting memperhatikan kualitas pelatihan agar peserta dapat mempertahankan skill/kemampuan pasca pelatihan. Inilah yang menyebabkan berhasilnya BLK Makassar dalam mendukung percepatan penyerapan tenaga kerja. Balai Latihan Kerja memberikan dukungan bagi Pemuda yang terlibat dalam pelatihan selama kalender pendidikan yang ditetapkan. Pelatihan yang diikuti bertujuan untuk meningkatkan wawasan dan keterampilan. Mila salah satu peserta yang merasakan fungsi BLK baik proses maupun pasca pelatihan hingga mendapatkan pekerjaan.

“Kalau saya kak berguna ilmu dari BLK, karena sekarang pekerjaanku harus pakai komputer. Alhamdulillah, tidak sia-sia ambil kelas di BLK. Seru juga kalau ikut pelatihan, banyak teman dari kecamatan lain. Baru kan gratis, itupun masih banyak teman-teman yang tidak lulus jadi peserta” Wawancara, Januari 2020).

Dalam partisipasi Arnstein, Mila telah berada pada tingkat Citizen power dimana ia telah mampu lulus di BLK, mendapatkan pekerjaan dan menerapkan ilmu yang didapatkan. Manfaatnya dapat digunakan ketika pemuda telah menyelesaikan pelatihan serta menjadi khasanah pengetahuan jika ingin membuat usaha baru. BLK juga menjadi tempat pengembangan usaha, fungsi ini sangat efektif dalam menumbuhkan usaha-usaha baru di Kabupaten Takalar. Pelatihan yang menarik usaha baru yaitu otomotif, tata rias, dan menjahit. Pemuda tergabung dalam kegiatan BLK memanfaatkan momentum program pemerintah dan peningkatan kapasitas dan kapabilitasnya.

Rismunandar dalam penelitiannya menemukan bahwa peran BLK berpengaruh dalam membangun kemandirian remaja. Hasil ini juga menunjukkan bahwa peran BLK tidak melihat asalnya dari wilayah mana tetapi berdasar pada motivasi pada peserta didik (Masjkur, 2018). Artinya peningkatan kapasitas dan kapabilitas pemuda sangat perlu didukung oleh program-program produktif dari BLK tanpa melihat syarat administrasi daerah asal. Selain itu perlu adanya kemauan pemuda dalam menyukkseskan kegiatan pelatihan, karena telah banyak preferensi yang disediakan oleh pemerintah dalam mengembangkan kompetensi.

Partisipasi Dalam Bidang Perdagangan

Membuka usaha baru merupakan salah satu bentuk partisipasi dari pemuda. Belakangan marak yang membuka lapak di media sosial, dengan memaksimalkan pasar yang lebih luas. Kebutuhan akan pangan harus dapat di dukung dari lingkungan sekitar, peluang tersebut dimanfaatkan pemuda untuk berdagang sayur dan menyuplai kebutuhan masyarakat. Selain itu, pemuda juga aktif menjadi reseller mulai dari produk perawatan kulit hingga pakaian. Berdagang di sosial media sudah jadi lumrah di kalangan anak muda. Hal ini umum kita temui pada pemuda di wilayah daratan. Sedangkan pemuda pesisir, juga melakukan hal yang sama namun ada juga yang memanfaatkan potensi sumber daya dengan berjualan hasil perikanan baik dalam keadaan mentah maupun hasil olahan. Hal ini dilakukan karena sulitnya mendapatkan pekerjaan sehingga berdagang menjadi pilihan alternatif.

“Susah dapat kerja kak, kalau berpenghasilan ya harus bikin usaha. Lagian kan sekarang canggih mi, di sosmed saja dulu promo toh. Mungkin awalnya bosan orang liatki, posting-posting dagangan ta tapi nanti kalau butuhki, kita ji lagi nahubungi itu” (Wawancara, Februari 2020).

Teknologi berkembang dengan cepat dan memiliki pengaruh signifikan dalam semua aspek kehidupan manusia. Teknologi membantu orang untuk berkomunikasi, dan berdagang bagi pelaku usaha agar menjangkau orang-orang dari seluruh dunia dengan mudah, cepat dan murah. Putri memulai usahanya karena belum mendapatkan pekerjaan, dengan begini ia tetap mandiri dan berpenghasilan serta mengasah kemampuan pemasarannya. Fase ini merupakan proses adaptasi pemuda sebelum memasuki dunia kerja. Sebagaimana teori Gerungan dalam (Saputro & Sugiarti, 2021) bahwa adaptasi adalah suatu penyesuaian pribadi terhadap lingkungan. Penyesuaian ini dapat berarti mengubah diri pribadi sesuai dengan keadaan lingkungan, jadi dapat berarti mengubah lingkungan sesuai dengan keadaan pribadi. Pemuda wilayah pesisir berpartisipasi dengan mandiri dengan berdagang ikan sampai rumput laut. Keuntungan diperoleh untuk memenuhi kebutuhannya hingga menjadi sumber tabungan. Kelompok pemuda ini dapat kita temui di Kecamatan Galesong hingga Manggarabombang.

Penggunaan gawai tidak hanya untuk mengakses informasi tetapi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transaksi perdagangan. Pemuda yang di wilayah Pattallassang menjadi pusat dari kegiatan ini. Tidak hanya pakaian, makanan, dan sejenisnya, rumah dan seisinya dapat dijual melalui media digital. Inisiatif pemuda untuk membuat toko daring adalah bentuk kegiatan yang meliputi pembelian, penjualan dan pemasaran barang atau jasa melalui sistem elektronik. Pembayaran dilakukan dengan sistem yang telah ditentukan dan barang akan dikirim melalui layanan pengiriman barang. Pemuda menganggap bahwa usaha ini memiliki rentan kerugian yang rendah.

Membuka lapak daring adalah salah satu fasilitas yang disajikan oleh internet yang menyediakan berbagai fasilitas. Kenyamanan yang diberikan dalam berbelanja adalah efisiensi waktu, tanpa harus bertemu muka dengan pelanggan, mereka dapat membeli kebutuhan yang diinginkan tanpa menghabiskan waktu dan tenaga. Karena kemudahan ini, berdagang secara daring semakin diminati.

“Saya di Polut, kuposting di sosmed, yang order orang Galesong kota, cuma modal kalimat ‘pesan ki kak nanti diantarkan free wilayah Takalar’ langsung ada yang pesan. Padahal kan mereka cuma liat gambar tapi di pesan, untungnya sedikit ji. cuma tidak akan cukup satu juta kalau kurang sepuluh ribu” (Februari, 2020).

Namun tidak mudah untuk melakukan bisnis melalui internet, karena ada beberapa kendala yang sering menjadi masalah, yaitu kurangnya kepercayaan calon pembeli di situs/ postingan penjual. Karena penipuan yang meluas di internet. Meskipun hanya ada beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab, dampaknya ada pada semua situs penjualan. Mereka menjadi kurang dipercaya oleh calon pembeli. Berdasarkan hasil wawancara, pemuda banyak yang bergerak di dropshipping dan reseller. Mereka sering menemui kasus salah barang, namun beberapa konsumen tidak mempermasalahkan jika barangnya masih bisa dipakai. Hal lain yang kerap ditemui adalah pelanggan yang pesan namun batal membeli.

“Iya kak ada, dia semangat diawal pesannya, pas datang barangnya eh di cancel. Padahal ini kita bayar, jadinya kita yang mikir lagi bagaimana caranya laku. Biasanya dipromosikan terus di sosmed, dan alhamdulillah laku. Kalau tidak laku ya sabar saja, kita yang pakai produknya” (Wawancara, Februari 2020).

Dropshipping adalah upaya penjualan produk tanpa harus memiliki produk apapun. Pembelian dropshipping menyediakan penjualan barang langsung dari pemasok/toko tanpa harus menyediakan barang terlebih dahulu. Namun karena ingin memperoleh untung lebih cepat maka informan memesan lebih dahulu tanpa pelanggan membayarnya (Hasanah, 2019). Bisnis ini tidak memerlukan modal besar, waktu, dan energi, sehingga penjual tidak perlu membeli barang terlebih dahulu untuk dijual, tetapi hanya menyediakan alat pemasaran seperti Facebook dan Sosial Media. Tahapan pembelian dan penjualan dropship adalah sebagai berikut: Setelah pembeli membayar barang yang dibeli, penjual akan membayar harga dropshipper dan mengirimkannya ke pembeli. Perusahaan dropshipper akan mengirimkan produk ke pelanggan langsung. Selisih antara harga penjual dan harga dropshipper adalah keuntungan penjual (Arifin, 2020).

Dropshipper adalah pilihan profesi penjual yang tanpa harus menyediakan produk juga tidak direpotkan dengan pelayanan terhadap konsumen (packaging dan pengiriman barang) (Amalia et al., 2021). Tidak hanya untuk pemuda yang ada di wilayah perkotaan, wilayah pesisir telah menggunakan sistem ini. Sistem dropship memudahkan para pemula maupun pelaku bisnis toko daring untuk mendatangkan keuntungan yang cukup besar setiap bulannya. Selain dropshipping model bisnis daring lainnya yaitu reseller. Reseller adalah penjual yang menjual barang milik penjual lain (bukan barang miliknya). Reseller sendiri dapat membantu memasarkan penjualan dari penjual lain. Sistem yang diterapkan oleh reseller dalam ilmu manajemen dimasukkan sebagai strategi distribusi tidak langsung.

Menjadi reseller tidak mendapat upah dari produsen secara langsung melainkan mereka mendapat upah melalui harga khusus yang diterapkan oleh produsen. Reseller akan mendapat upah dari selisih harga beli dan harga jual. Penelitian yang dilakukan Muflikhata menunjukkan bahwa motivasi pemuda bergabung

dalam reseller adalah untuk meraup keuntungan. Ekspektasi pendapatan dapat sesuai jika menjalankan bisnis dengan mengedepankan kepuasan konsumen. Pekerjaan inilah dapat dijalankan meski minim modal (Mufidha et al., 2019).

“Alhamdulillah, di sini banyak yang menggeluti usaha begini. Soalnya kita kan aksesnya ke kota dekat terus kita kasi pelayanan free ongkir jadi pelanggan tetap tertarik. Dengan punya usaha ini, saya bisa sambil cari juga kerjaan tetap. Usaha ini jadi sampingan supaya kalau kerja tidak kaget dengan suasana kerja. Dengan begini, saya makin tau bagaimana susahnyanya cari uang” (Wawancara, Februari 2020).

Hasil observasi dan wawancara, ada 20 daftar anak muda yang aktif berwirausaha melalui media sosial baik sebagai reseller maupun dropshipper. Informan tersebut masuk dalam kategori citizen power yang mana informan memiliki wewenang sendiri serta mengambil keputusan dalam menyukseskan usahanya. Program yang pada umunya memberikan kesempatan pada pemuda untuk terlibat aktif akan berdampak pada partisipasi penuh. Kategori citizen power juga ditemukan oleh Wibawa pada partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan dalam rehabilitasi hutan Kabupaten Sleman. Masyarakat diberikan pemahaman melalui simulasi kegiatan hingga memahami secara teknis program rehabilitasi (Wibawa, 2014). Hal ini juga penting pada pemberian pelatihan program-program yang berkaitan dengan usaha dropshipping kepada anak muda agar dapat berkembang lebih maju.

Partisipasi di Bidang Industri Makanan

Pada unit usaha kecil menengah, industri makanan merupakan usaha yang relatif membutuhkan modal. Berbekal resep, modifikasi, model, dan rasa sebuah usaha mampu menghasilkan profit. Partisipasi bagian industri makanan cukup banyak yang berminat namun belum mampu menembus pasar besar karena masih skala kecil produksinya. Kalangan pemuda yang berhasil merintis usaha donat adalah Syamsuddin dengan brand “Ampa bakery”. Ia mengaku bahwa usahanya ini pernah mendapat bantuan dari Bupati Takalar dalam bentuk mesin adonan. Baginya membuat usaha ini adalah sesuatu yang ia rintis sejak tahun 2014 dan membuka gerai di tahun 2017 di beberapa kecamatan di Kabupaten Takalar.

“Namanya usaha pasti ada rugi-untungnya, saya sudah memulai dari nol memanfaatkan usaha kecil dari SMA kemudian saya kembangkan dengan melakukan peminjaman modal dari berbagai tempat. Alhamdulillah setelah jalan beberapa kali percobaan akhirnya dapat bantuan modal usaha dari kegiatan mahasiswa. Makin semangat lagi ketika dapat bantuan dari pemerintah kabupaten Takalar. Saya sudah melewati beberapa kali kerugian juga kak. Ada karyawan yang tidak jujur, produk yang tidak laku, hingga beban operasional daripada pendapatan” (Wawancara, Februari 2020).

Sektor UMKM produk donat dapat menyerap tenaga kerja. Informan menganggap bahwa bisnis ini telah membuat hidupnya semakin produktif dan dapat membantu orang tua. Usaha yang dirintis ini bermula ketika ia mendapat dana dari hiba Program Mahasiswa Wirausaha yang diadakan oleh Kemahasiswaan Universitas Hasanuddin di 2015. Dari modal tersebut ia mendapat pelatihan dan pendampingan dari kampus hingga bisa membangun brand Ampa bakery.

Berdasarkan teori Arnstein (1969) Syamsuddin telah berpartisipasi penuh dalam program penyerapan tenaga kerja baru (Citizen power) (Arnstein, 1969). Secara wilayah, Syamsuddin merupakan pemuda pesisir yang berhasil mendirikan usaha di Kabupaten Takalar. Kegigihannya dalam memasarkan produknya, dimulai dari berjualan di media sosial. Produknya direspon positif oleh publik yang harganya sangat terjangkau oleh masyarakat menengah. Pesanan yang banyak membuatnya sulit menjangkau seluruh customer di kota Makassar. Proses produk yang diproduksi di Takalar membutuhkan waktu hingga sampai di tangan konsumen.

Usaha produksi makanan juga ditekuni oleh Selfi (24 tahun), ia memiliki brand yaitu Browkat. Browkat merupakan kue hasil olahan dari buah alpukat. Dalam menjalankan usahanya ia juga aktif menggunakan media sosial dalam berjualan. Meski telah lulus sebagai sarjana namun ia juga sempat beberapa kali gagal tes kerja hingga beralih menjadi pengusaha muda. Usaha ini mulai dirintis pada tahun 2018. Browkat diminati karena kemasan dan rasanya sangat berbeda dengan kue-kue lain. Keuntungan dapat juga diperoleh dari penjualan makanan lain jika ada pelanggan yang memesan. Seperti ayam lalapan, nasi bakar, dan kue-kue lainnya.

“Kendalaku cuma modal, kalau dari segi produk, saya juga bisaji buat produk unggulan. Cuman, sekarang sendiri rintiski tapi kalau sekali upload di facebook, pasti banyak yang pesan. Alhamdulillah ada-ada ji saja karena namanya usaha. Harapannya saya punya modal

sekalian buat rumah makan atau catering. Karena kalau soal pekerja di sini banyak jia yang bisa” (Selfi, 24 tahun).

Informan memahami potensi daerah dan perusahaan produktif. Namun, masih sulit menemui warung makan yang menyediakan makanan berat. Yang umum ditemui penjual bakso dan mie pangsit. Variasi produk makanan di sekitar PTPN XIV Persero perlu dilakukan agar karyawan punya referensi dalam mencari tempat makan.

Pemuda harus memanfaatkan peluang yang ada, jiwa mandiri harus dibentuk agar mampu menghadapi resiko usaha yang nantinya muncul. Hal ini juga disebutkan bahwa sifat dari resiko usaha itu sendiri adalah tidak pasti dan sebagian besar menimbulkan kerugian. Kerugian inilah yang menjadi salah satu faktor pemuda tidak berani mendirikan usaha (Santosa, 2020). Pemuda harus siap atas segala resiko yang akan mereka hadapi ketika membuka usaha. Dua hal yang akan ditemui yaitu rugi materil dan nonmateril. Usaha harus terus berjalan dan terus profit, di sisi lain usaha itu juga harus menjaga kepercayaan terhadap masyarakat. Maka usaha tersebut perlu mempekerjakan SDM yang memiliki loyalitas dan etos kerja yang tinggi, agar usaha itu terus dapat maju.

Partisipasi Nonfisik

Dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap kabupaten memiliki wewenang dalam mengatur seluruh potensi daerah yang dimiliki. Pemerintah Kabupaten Takalar dapat mengembangkan potensi yang ada baik dari bagian pesisir hingga daratan. Optimalisasi ini perlu dilakukan untuk mengatasi pengangguran (Duadji, 2013).

Peran tersebut menjadi perhatian pemuda tentang bagaimana peran pemerintah dalam membangun Kabupaten Takalar. Mengingat banyaknya peluang untuk membuka usaha baru namun belum maksimal. Beberapa organisasi membuka diskusi dengan evaluasi program Pemerintah Daerah seperti kegiatan yang diadakan oleh Himpunan Pelajar Mahasiswa Takalar Komisariat Sekolah Tridarma Nusantara Makassar di Café d Bos. Pada tanggal 10 Januari 2020, kegiatan tersebut juga turut dihadiri Wakil Bupati Takalar Periode 2017-2022. Pemerintah menjawab pertanyaan pemuda dengan memperkirakan realisasi program mencapai 42%, hal tersebut realistis tuntas hingga masa jabatannya selesai. Perihal banyaknya komentar negatif dikarenakan pelaksanaan program dilakukan secara bertahap sehingga tidak bisa menjangkau seluruh elemen masyarakat.

“Kegiatan ini bertujuan untuk mempertemukan para pemuda yang menduduki posisi strategis di Kabupaten Takalar. Selain itu, yang hadir jadi peserta juga pemuda. Mereka kami ajak untuk membangun Kabupaten Takalar dengan memberikan saran atau kritikan yang membangun. Alhamdulillah setiap mengadakan diskusi seperti ini, sangat tinggi antusias anak muda” (Maret 2020).

Hasil dari diskusi tersebut membahas berbagai permasalahan kepemudaan yang belum memiliki payung hukum sehingga dicanangkan Rancangan Peraturan Daerah berkaitan dengan pengembangan kepemudaan di Kabupaten Takalar. Sejauh ini Kabupaten Takalar belum mengeluarkan peraturan tersebut yang sebenarnya wewenang dari Anggota DPRD.

Diskusi berfungsi untuk melatih kita hidup bermusyawarah dalam menyelesaikan berbagai masalah dan mencari solusinya. Selain itu, dapat menumbuhkan sikap saling menghargai pendapat, serta dapat mengerjakan sesuatu dengan cepat dan mampu menumbuhkan kerja sama yang baik (Sakinah & Dewi, 2021). Pemuda yang terbiasa melakukan diskusi akan menerima umpan balik dari audiens dan menjadikannya sebagai pengetahuan.

“Pesta komunitas juga sangat ramai, anak muda memadati arena kegiatan bahkan sesuai eskpektasi kita sebagai panitia. Dari kegiatan ini kita melihat, oh ternyata ada ya komunitas yang unik dan seru di Kabupaten Takalar. Yang ternyata mereka sudah punya chanel youtube dan berpenghasilan. Sangat penting kegiatan ini diadakan untuk menarik minat anak muda Kabupaten Takalar untuk berorganisasi, menjaling jejaring dan tentunya punya wawasan yang luas” (Wawancara, Maret 2020).

Pemuda yang tergabung dalam beberapa komunitas pemuda juga memiliki peran dalam membangun sumber daya manusia. Dalam pesta Komunitas Kabupaten Takalar 2019 terdapat 44 Komunitas pemuda yang ikut terlibat. Kegiatan tersebut menampilkan berbagai kreasi kerajinan, diskusi hingga penampilan seni. Beberapa hal yang menjadi topik dalam diskusi tersebut, seperti rencana regulasi tentang kepemudaan, optimalisasi pendidikan, prestasi olahraga hingga sumber daya yang dimiliki Kabupaten Takalar.

Partisipasi non fisik mengedepankan pada kegiatan berkaitan dengan tema penelitian seperti dialog atau diskusi, seminar, hingga kumpulan gagasan atau ide yang membangun. Beberapa bentuk dari aktivitas

ini meliputi media sosial dengan nama akun instagram “Takalar info” yang aktif memberikan informasi berkaitan dengan Kabupaten Takalar, baik itu kejadian-kejadian hingga lowongan kerja.

Kabupaten Takalar menjadi salah satu destinasi wisata di akhir pekan. Peluang membuka usaha baru mulai dari garis pesisir hingga daratan. Hingga lahir permandian di beberapa titik seperti Permandian Bissua, Topejawa, Pantai Bintang, Takalar Beach Waterboom, Taman Wisata Rita, Pantai Sampulungan, Pantai Punaga, Pantai Pokko, Air terjun Ko'mara, Pulau Sanrobengi, Telaga Ko'mara, dan berbagai daerah permandian lainnya. Selain itu ada juga Taman cinta Palleko, Taman Buruh Ko'mara, Monumen Lapris Takalar yang semuanya telah menarik tumbuhnya UMKM di sekitar tempat wisata tersebut. Potensi ini beberapa kali menjadi sorotan kelompok pemuda karena dianggap harusnya dapat menyerap potensi tenaga kerja.

Berdasarkan teori Arnstein (1969), diskusi dan memberikan ide jika tidak direalisasikan termasuk kategori Tokenism. Hal inilah yang menjadi kritikan dari pemuda mengangkat isu-isu yang semestinya terselesaikan. Isu tersebut berkaitan dengan masalah pengangguran yang setiap tahun bertambah namun program stimulus dalam mencegah kondisi tersebut berjalan dengan lambat. Sehingga partisipasi pemuda berujung pada tokenism dan menyebabkan stagnasi. Penelitian yang dilakukan oleh Ramdani (Ramdani & Habibi, 2017) dalam penguatan partisipasi masyarakat dalam mendorong program smart city, masuk dalam kategori tokenisme. Artinya, masyarakat memiliki kesempatan untuk berpendapat, namun mereka tidak memiliki wewenang dan kekuatan untuk mengatur program kegiatan secara keseluruhan meskipun telah dirumuskan ditingkat daerah. Pemuda yang menduduki jabatan strategis, belum mampu berbicara banyak dalam ranah pengambilan keputusan di tingkat daerah.

Simpulan

Partisipasi Pemuda dalam mengembangkan kompetensi lebih baik jika sejalan dengan program-program Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar. Pemuda dapat memberikan kemampuan terbaiknya melalui partisipasi sebagai pelaksana ataupun peserta dalam program. Sebagai pelaksana Pemuda dapat membuka lapangan pekerjaan melalui pengembangan UMKM. Sebagai peserta, pemuda dapat mengembangkan kompetensi di Balai Latihan Kerja sesuai dengan minat yang diinginkan. Ada banyak hal yang dapat dilakukan pemuda dalam rangka berperan sebagai kelompok Citizen Power. Pemuda telah mampu berkontribusi dalam penyerapan tenaga kerja terutama bidang industri makanan, namun di bidang perdagangan, pemuda masih membutuhkan akses modal dan pelatihan untuk mengembangkan usaha yang dimiliki. Pemuda juga telah menjalani proses berwirausaha dengan menghadapi resiko-resiko dalam mempekerjakan orang, kerugian materil dan nonmateril. Hal ini merupakan rangkaian hal yang harus dihadapi oleh pemuda dalam mengambil keputusan.

Hasil penelitian ini memfokuskan pada tema ketenagakerjaan yang berkaitan dengan program pemerintah dan partisipasi pemuda. Hal-hal lain yang lebih spesifik pada aktivitas sehari-hari oleh pemuda baik sebagai pelaksana kegiatan atau peserta digambarkan secara umum. Penelitian lanjutan dapat mengembangkan tema ini lebih spesifik pada skala usaha, Balai Latihan Kerja, Kebijakan Daerah atau lainnya. Tema Ketenagakerjaan saat ini adalah tema yang dapat terus terjadi seiring dengan tingginya tingkat persaingan kerja.

Rujukan

- Amalia, A. P., Nurjanah, S. A., Purbandani, U., & Saputra, D. I. S. (2021). Use of Instagram for Marketing of Ulvisa Shop Products during the COVID-19 Pandemic. *JUDIMAS*, 1(2), 140–151.
- Andayani, I., Roesminingsih, M. V., & Yulianingsih, W. (2021). Strategi Pemberdayaan Masyarakat Pelaku UMKM Di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Pendidikan Nonformal*, 16(1), 12–20.
- Andzarini, N., & Sutarto, J. (2020). Manajemen Pelatihan Operator Komputer Tingkat Lanjutan. *Jurnal Eksistensi Pendidikan Luar Sekolah (E-Plus)*, 5(2).
- Arifin, M. J. (2020). Keabsahan Akad Transaksi Jual Beli dengan Sistem Dropshipping dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Lisyabab*, 1(2), 279–290.
- Arnstein, S. R. (1969). A Ladder of Citizen Participation. *Journal of the American Institute of Planners*, 35(4), 216–224.
- Asjhari, A. (2013). Pengukuran Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa Cibedug, Kabupaten Bogor dalam Pembangunan Jalan Desa Tipe Otta Seal. *Jurnal Sosial Ekonomi Pekerjaan Umum*, 5(2).
- Brilianing, T. T. A. Y. (2019). Peran Kepala Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa di Desa Seduri Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto. Skripsi Jurusan Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan-Fakultas Ilmu Sosial UM.

-
- Duadji, N. (2013). Partisipasi publik dalam pengambilan keputusan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Provinsi Lampung. *Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance*, 5(3), 197–203.
- Fitra, H. A., & Anggraeni, M. (2016). Kajian Tingkat Partisipatif Dalam Proses Perencanaan Pembangunan Kota Semarang Yang Inklusif. Riptek.
- Hasanah, N. (2019). Analisis Mekanisme Dropshipper dan Reseller di Toko Online S3 Komputer Surabaya. UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Laily, E. I. N. (2015). Partisipasi Masyarakat dalam perencanaan pembangunan partisipatif. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, 3(2).
- Masjkur, M. (2018). Peran Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Membangun Self Control Remaja Di Sekolah. *At-Tuhfah: Jurnal Keislaman*, 7(1), 25–26.
- Melinda, S., Fitlayeni, R., & Ariesta, A. (2021). Pemberdayaan Masyarakat Pengrajin Songket Silungkang di Kota Sawahlunto, Sumatera Barat. *Jurnal Socius: Journal of Sociology Research and Education*, 8(2), 113–124.
- Mufidha, S., Multifiah, M., & Satria, D. (2019). Menelusur Struktur Pasar Pada Kontrak Informal di Sentra Industri Brem. *EcceS (Economics, Social, and Development Studies)*, 6(2), 190–213.
- Ramdani, D. F., & Habibi, F. (2017). Penguatan Partisipasi Masyarakat Dalam Mendorong Program Smart City di Kota Bandung. *Prosiding Seminar Nasional Riset Terapan | SENASSET*, 125–129.
- Sakinah, R. N., & Dewi, D. A. (2021). Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Karakter Dasar Para Generasi Muda Dalam Menghadapi Era Revolusi Industrial 4. 0. *Jurnal Kewarganegaraan*, 5(1), 152–167.
- Santosa, A. (2020). Pengembangan Ekonomi Kreatif Industri Kecil Menengah Kota Serang di Masa Pandemi Covid-19. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 5(11), 1257–1272.
- Santoso, E. B., & Moenek, R. (2018). Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Kota Balikpapan. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 8(2), 97–112.
- Saputro, Y. A., & Sugiarti, R. (2021). Pengaruh Dukungan Sosial Teman Sebaya dan Konsep Diri terhadap Penyesuaian Diri pada Siswa SMA Kelas X. *Philanthropy: Journal of Psychology*, 5(1), 59–72.
- Sigalingging, A. H., & Warjio, W. (2014). Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan (Studi Kasus Pada Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi). *Jurnal Administrasi Publik: Public Administration Journal*, 4(2), 116–145.
- Tata, E. (2015). Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Program Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Soatobaru Kecamatan Galela Barat Kabupaten Halmahera Utara. *Jurnal Politico*, 4(2).
- Wibawa, A. (2014). Pemberdayaan Masyarakat dalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan melalui Program Kebun Bibit Rakyat di Desa Sumberrejo Kecamatan Tempel Kabupaten Sleman. *Jurnal Pembangunan Wilayah & Kota*, 10(2), 187–196.
- Wibowo, M. (2016). Menakar konstitusionalitas sebuah kebijakan hukum terbuka dalam pengujian undang-undang. *Jurnal Konstitusi*, 12(2), 196–216.